



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Arsip Dinamis;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis Sebagai Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
9. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
10. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
11. Kategori Pembatasan Akses Terhadap Arsip adalah kewenangan pengguna arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
12. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.

13. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
14. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
15. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
16. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
17. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
18. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
19. Penggunaan arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna yang berhak.
20. Penentu Kebijakan adalah pejabat yang mempunyai fungsi, tugas, tanggungjawab dan kewenangan kedinasan keluar dan ke dalam instansi seperti pimpinan tertinggi Eselon II atau Eselon III pada Instansi Balai/UPT/Kantor pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
21. Pelaksana Kebijakan adalah Pejabat pada unit kerja yang melaksanakan fungsi dan tugas organisasi setingkat Eselon III dan IV seperti Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang/Sub Bagian/Kepala Seksi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
22. Pengawas adalah Pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan seperti Inspektur/Auditor pada Inspektorat, pengawas Intern pada Satuan Pengawas Intern pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
23. Aparat Penegak Hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
24. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
25. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
26. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu:
- a. memotivasi Perangkat Daerah agar memberkaskan arsip dinamis secara tertib yang disertai dengan daftar arsipnya;
 - b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu:
- a. menjadikan acuan pelaksanaan dan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman
 - c. tersedianya informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
 - d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. azas dan pengorganisasian;
- b. pengamanan arsip dinamis;
- c. pembiayaan.

BAB IV AZAS DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Azas

Pasal 4

- (1) Azas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Daerah dilaksanakan dengan menerapkan azas gabungan yaitu azas sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan azas desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.

- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan standar operasional prosedur, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Pengorganisasian

Pasal 5

Pengorganisasian Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Daerah ebagai berikut:

- a. arsip yang tercipta di Lingkungan Daerah diklasifikasikan menjadi informasi biasa/terbuka,terbatas dan rahasia;
- b. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya, semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. pengguna internal hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; dan
- e. pengguna eksternal hanya dapat mengakses informasi Daerah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

BAB V
PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu
Sarana

Pasal 6

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Daerah menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filing kabinet/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.

- (3) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Daerah menggunakan sarana perangkat lunak (*software*) sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip.
- (2) Arsiparis/pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggungjawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaan arsipnya.
- (3) pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses

Pasal 9

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Daerah yang termasuk dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja Daerah, antara lain:

- a. arsip dinamis pada lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. arsip dinamis pada lingkungan Inspektorat;
- c. arsip dinamis pada lingkungan Badan dan Dinas;
- d. arsip dinamis pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah; dan
- e. arsip dinamis pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 10

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Daerah yang termasuk dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian sepertipersonil file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan, rekam medis pegawai;

- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
- e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 11

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Daerah yang termasuk dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Daerah meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan personal file;
- b. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan dan instalasi listrik/telepon;
- c. arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
- d. arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
- e. arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- f. arsip yang dengan isi akta otentik yang terakhir ataupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
- g. arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
- h. arsip yang terkait dengan *memorandum of understanding*; dan
- i. daftar arsip rahasia.

Pasal 12

Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.

Pasal 13

Penyusunan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Tabel klasifikasi keamanan dan pengamanan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

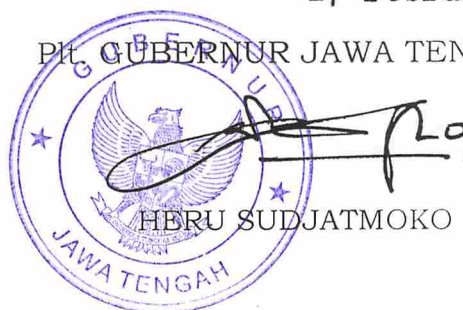
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Pebruari 2018

PL. GUBERNUR JAWA TENGAH,



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



SRI PURYONG KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 19

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
UMUM						
	001	Lambang, meliputi : a. Garuda b. Bendera kebangsaan c. Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) d. Bandir/umbul-umbul	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Rumah Tangga Setda, Bagian TU dan Rumah Tangga Pimp, Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum.
	002	Tanda kehormatan/penghargaan diberikan kepada non PNS				
	003	Hari Raya/besar, meliputi : a. Nasional (17 Agustus, hari pahlawan, dsb) b. Keagamaan c. Hari ulang tahun				
	004	Ucapan, meliputi: a. Terima kasih b. Selamat c. Mohon diri d. Bela sungkawa, dan lainnya				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	005	Undangan (laporan kegiatan pembuatan undangan beserta distribusinya)				
	006	Tanda jabatan (Pamong praja dan pejabat lainnya)				
	010	Urusan dalam, meliputi: a. Gedung kantor termasuk instalasi (listrik, telepon, otomasi/internet, air minum, hidrant, alarm, drainage				
	010	b. Rumah dinas, persinggahan (mess/wisma/hotel), rumah susun. c. Peminjaman sarana prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, lcd, laptop dll d. Pengurusan kendaraan dinas e. Keamanan/ketertiban kantor f. Perjanjian kerjasama MOU Pemda dengan instansi pemerintah, swasta g. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Kenegaraan dan hari-hari besar Keagamaan h. Kebersihan kantor i. Protokol (upacara bendera, tata tempat, pemasangan kepala negara/daerah, audensi, penerimaan tamu) j. Kerjasama	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Rumah Tangga Setda, Bagian TU dan Rumah Tangga Pimp, Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	020	Barang dan Jasa, meliputi : a. Penawaran (barang, jasa) b. Penawaran barang (bergerak, tidak bergerak) c. Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, prakualifikasi, evaluasi, penunjukan lelang d. SPK, kontrak/amandemen/addendum, teguran e. Surat Perintah Mulai Kerja f. Serah terima pekerjaan g. Pemeriksaan pekerjaan h. Perpanjangan waktu i. Denda j. Sanggahan k. Pemeliharaan barang/jasa l. Inventaris termasuk pendataan, pemeliharaan, penghapusan barang milik negara				1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Rumah Tangga Setda, Bagian TU dan Rumah Tangga Pimp, Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum; 3. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	020	m. ULP Barang dan Jasa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Rumah Tangga Setda, Bagian TU dan Rumah Tangga Pimp, Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum;
	020	n. Usulan tentang pengadaan barang pakai habis beserta distribusi dan pelaporannya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Rumah Tangga Setda, Bagian TU dan Rumah Tangga Pimp, Bagian Humas dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Protokol pada Biro Umum; 3. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	030	<p>Kekayaan Daerah, meliputi :</p> <p>a. Barang-barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak)</p> <p>b. Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen, bangunan bersejarah, dll)</p> <p>c. Barang persediaan dalam gudang</p> <p>d. Alat pengangkut (laut, darat, udara)</p> <p>e. Peralatan pabrik, Laboratorium</p> <p>f. Peralatan kesehatan/medis (runah sakit, balai pengobatan)</p> <p>g. Usulan penambahan aset Daerah, barang bergerak maupun tidak bergerak</p> <p>h. Permintaan perbaikan, perawatan barang inventaris beserta pelaporannya</p> <p>i. Penghapusan aset-aset barang milik Daerah</p> <p>j. Usulan kebutuhan barang/jasa pendukung operasional kegiatan rumah tangga Dinas, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda beserta pelaporannya</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah;</p> <p>2. Bagian Rumah Tangga Setda, Bagian TU dan Rumah Tangga Pimp, Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum;</p> <p>3. Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah pada BPKAD</p>
	030	<p>k. Peminjaman sarana/prasarana, gedung kantor/ barang inventaris, aset bergerak maupun tidak bergerak</p> <p>l. Tata cara, prosedur pengamanan dan ketertiban asset-asset barang milik Daerah</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah</p> <p>2. Bagian Rumah Tangga Setda, Bagian TU dan</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Rumah Tangga Pimp, Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum 3. Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah pada BPKAD
	040	Kebijakan pemerintah pada bidang Kearsipan dan Perpustakaan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan dan pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	040	Akuisisi, pengolahan dan penyimpanan bahan perpustakaan Pelestarian bahan perpustakaan Pengolahan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam Penyusunan Bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta literatur sekunder Transliterasi, translasi Survey kondisi bahan perpustakaan Perawatan, pemeliharaan, pengawetan bahan perpustakaan dan alih media bahan perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Deposit Dan Pengolahan Bahan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	040	Pengembangan bahan perpustakaan Pembinaan perpustakaan Pengembangan dan kerjasama perpustakaan Pembudayaan gemar membaca Penerapan, norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perpustakaan Bimbingan Teknis perpustakaan dan kepustakawanan, Penilaian Angka Kredit Pustakawan Pemasyarakatan bidang perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	040	Pembinaan Dan pengembangan Kearsipan Bimbingan Teknis Kearsipan Pemantauan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada perusahaan,Ormas/Orpoldan masyarakat Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria arsip Pengembangan kelembagaan,Sumber daya manusia,sarana prasarana dan sistem kearsipan Penyusunan kajian bidang kearsipan,pengembanganlaboratorium sistem kearsipan Audit kearsipan,evaluasi dan Penilaian hasil pengawasan kearsipan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	040	Akuisisi arsip Penilaian dan verifikasi arsip yang akan disusutkan Koordinasi dan konsultasi akuisisi arsip Penerimaan, Pemindahan dan penyerahan arsip Penelusuran dan wawancara secara lisan Penyelamatan arsip vital daerah Pengolahan fisik arsip dan informasi arsip Penyusunan indeks, guide, daftar dan inventaris arsip Transkripsi rekaman suara Penyusunan arsip citra daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pelestarian dalam bentuk penyelamatan, pemeliharaan dan perlindungan arsip Alih Media dan Reproduksi arsip statis Pengujian kualitas media arsip dan sarana kearsipan Restorasi dan registrasi arsip Autentikasi arsip statis				
	040	Penelusuran sumber dan wisata arsip Penyajian informasi arsip dan penerbitan naskah sumber arsip Penyusunan tayangan naskah sumber arsip Pengolahan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Penghimpunan dan penyajian data dan informasi kearsipan Pameran, publikasi dan pemasyarakatan kearsipan	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	040	Laporan kegiatan operasional Perawatan Arsip beserta pengamanannya aset-aset arsip	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum
	040	SANDI 1. Pengamanan Persandian dan Informasi 2. Tata kelola persandian 3. Pembinaan, peningkatan kesadaran pengamanan informasi 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persandian 5. Pengelolaan security operation center	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Diskominfo 2. Bidang Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	050	RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang, Musrenbangpus RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Renstra (Rencana Strategi) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra Bappeda Program Nasional RKP (Rencana Kerja Pemb.) RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga) RKPD Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja Pemb. Daerah) Rencana Kerja Perangkat Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang pada BAPPEDA; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	050	KUA (Kebijakan Umum Anggaran) KUPA (Kebijakan Umum Perub. Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara) Jawaban Gub. Atas PandanganFraksi Nota Keuangan RKT (Rencana Kerja Tahunan) RKO (Rencana Kerja Operasional) Laporan Laporan berkala Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang pada BAPPEDA; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN Organisasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai Organisasi Non Pemerintah Organisasi Internasional Organisasi semi pemerintah Lembaga Non Struktural Kelas Jabatan Analisis Jabatan Pengukuran/Penilaian beban kerja Jabatan - Struktural dan Fungsional Uraian Jabatan Standar Kompetensi Teknis Standar Kompetensi Manajerial	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi
	060	Ketatalaksanaan Tata Naskah Dinas Stempel dinas dan stempel jabatan, Nama instansi pemerintah/non pemerintah, Alamat-alamat kantor dan pejabat, Ketentuan pakaian dinas dan atribut Pola Hubungan Kerja, Standar Rumah Tangga Operasional Prosedur Hari dan Jam Kerja Pegawai Indeks Kepuasan Masyarakat Standard Pelayanan Inovasi Pelayanan Standard Prasarana Kerja Pegawai	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	060	Akuntabilitas Kinerja Zona Integritas Reformasi Birokasi Budaya Kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat /Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokasi pada Biro Organisasi
	070	Penelitian dan Pengembangan Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai laporan riset	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kelitbangan pada BAPPEDA; 2. Sekretariat /Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	070	Pengembangan Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) SINAS (Sistem Informasi Nasional)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. UPP Iptekin pada BAPPEDA 2. Sekretariat /Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	070	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi cluster Kab/Kota Desa Inkubator Teknologi dan Bisnis	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kelitbangan pada BAPPEDA 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	070	Pameran Produk Inovasi/Ristek BTC (Bisnis Teknologi Center) Raptek (Penerapan Iptek) HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual) Kajian Kajian Strategis/diskusi/FGD Seminar, Workshop	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. UPP Iptekin pada BAPPEDA 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	070	Kerjasama Penelitian Rapat Koordinasi/Rapat Teknis Lokakarya Diseminasi/sosialisasi hasil penelitian Kerjasama Penelitian Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah Perguruan Tinggi/Swasta Lembaga Swasta Nasional, LSM Lembaga International Perekayasaan Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan) Publikasi Ilmiah Jurnal Ilmiah	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kelitbangan pada BAPPEDA 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	080	Konferensi pers/rapat koordinasi termasuk Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan Perangkat Daerah, instansi lainnya (dalam dan luar negeri) Himpunan materi sambutan pidato Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda Studi banding, Kunjungan kerja	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagian Rumah Tangga Setda, Bagian TU dan Rumah Tangga Pimp, Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum
	080	Bahan materi sambutan pidato Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat /Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah, 2. Bagian humas dan protokol pada Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Kebijakan, Pelaksanaan dan Evaluasi dalam Pelayanan dan pembangunan dengan lembaga masyarakat, promosi dan informasi serta anjungan TMII	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Subag TU pada Badan Penghubung
	090	Perjalanan dinas (SPT/ST/SPPD) meliputi : a. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga Non Kementerian, Tamu asing (ke daerah, Eselon I) b. Gubernur, Wakil Gubernur c. Laporan perjalanan pegawai, SPPD ke Pusat, Daerah dan Luar Daerah d. Laporan hasil kegiatan peliputan Kunker RI, Wagub, Menteri, dan pejabat pusat ke daerah e. Laporan hasil peliputan kegiatan Kunker Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda ke Kabupaten/Kota.	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Bagian Rumah Tangga SETDA, Bagian TU dan Rumah Tangga Pimp, Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum.
	090	f. Laporan Perencanaan kegiatan Kunker Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat Pusat ke daerah	Rahasia	Dibatasi hanya untuk pihak Panitia penyambutan protokoler Rumah Tangga, penentu kebijakan, pengawas, penegak hukum	Sangat memiliki dampak mengganggu kinerja Perangkat Daerah bila ternyata berpotensi mengganggu keamanan kunjungan	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum
		g. Laporan perencanaan kegiatan kunker Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda ke Kabupaten/Kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk pihak panitia penyambutan, protokoler	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Bagian Humas dan Protokol pada Biro

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				penentu kebijakan , pengawas, penegak hukum		Umum
II. KEPEGAWAIAN						
	800	Kebijakan Kepegawaian, meliputi : a. Perencanaan b. Penelitian	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pegawai pada BKD
		c. Statistik	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Informasi Data Kepegawaian pada BKD
	810	Pengadaan Pegawai, meliputi : a. Pendaftaran cpns (Testing, Screening, Pengumuman tes dan pemanggilan, Pengujian kesehatan, Pengangkatan cpns golongan I-III) b. Pendaftaran tenaga kontrak kerja/MITRA KERJA	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bagian Umum, Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Bidang Mutasi pada BKD
	820	Mutasi, meliputi : a. Pengangkatan cpns b. Pengangkatan pns golongan I-III	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Mutasi pada BKD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	820	c. Pengangkatan dan pembebasan dalam jabatan struktural eselon I-IV	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada BKD
	820	d. Pengangkatan dan pemberhentian sementara dalam jabatan fungsional	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada BKD
	820	e. Kenaikan gaji berkala golongan I-IV	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Informasi Data Kepegawaian pada BKD 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	820	f. Kenaikan pangkat golongan I-IV g. Pemindahan/pelimpahan/pembantuan golongan I-IV h. Lolos butuh i. Datasering dan penempatan kembali j. Wajib militer	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Mutasi pada BKD
	830	Kedudukan, meliputi : a. Peninjauan masa kerja	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Mutasi pada BKD
		b. Penyesuaian pangkat/gaji golongan I-IV	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Mutasi pada BKD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KEAMANAN		PERTIMBANGAN	
			4	5	6	7
1	2	3	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada BKD
	840	c. Penghargaan ijasah (pencantuman gelar) Kesejahteraan Pegawai, meliputi : a. Tunjangan (struktural/fungsional) b. Kehormatan c. Tambahan penghasilan d. Taspen, Askes, BPJS, bantuan pendidikan, perumahan e. Surat dispensasi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD
	850	Cuti, meliputi : a. Tahunan b. Besar c. Sakit d. Bersalin e. Alasan penting f. Di luar tanggungan negara	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Mutasi pada BKD 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	860	Penilaian, meliputi : a. Penghargaan (satyalencana karya satya, kenaikan pangkat anumerta, hadiah kenaikan pangkat, pegawai teladan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD
	860	b. Hukuman (ringan, sedang, berat)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	860	c. Konduite/DP3	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, , terkait data pribadi	1. Bidang Mutasi pada BKD 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	860	d. Ujian dinas tingkat I dan III	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada BKD
	860	e. Penilaian kinerja (struktural dan fungsional)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Bidang Mutasi pada BKD 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	860	f. Rehabilitasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD
	870	Tata Usaha Kepegawaian, meliputi: a. Formasi pegawai	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada BKD 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	870	b. Bezetting/daftar urut kepegawaian c. DUK Non PNS tidak tetap/ BLUD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada BKD 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing pada Perangkat Daerah
	870	d. Sistem informasi kepegawaian (NIP, KARPEG, tanda pengenal, daftar keluarga, KARSU/KARIS, daftar riwayat pekerjaan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Mutasi pada BKD 2. Sekretariat /Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	870	e. Kewenangan administrasi kewenangan (pelimpahan wewenang, spesimen tanda tangan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Mutasi pada BKD
	870	f. KORPRI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	880	Pemberhentian, meliputi : a. Permintaan sendiri termasuk pengunduran diri dengan hak pensiun golongan I-IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Mutasi pada BKD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	880	b. Pensiun (janda/duda, yatim piatu)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Mutasi pada BKD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	880	c. Karena meninggal	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Mutasi pada BKD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	880	d. Alasan lain, keuzuran jasmani	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Mutasi pada BKD
	880	e. Tidak dengan hormat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD;
	880	f. Pembekalan pns yang akan purna dan tali asih	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD;

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	880	g. Per pemberhentian pegawai Non PNS tidak tetap/BLUD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	890	Pendidikan Pegawai (Tata Usaha) : a. Perencanaan program pelatihan b. Sarana Pendidikan c. Jenis diklat dan Pelaporan diklat d. Pengembangan kompetensi pegawai e. Tugas belajar (ijin belajar, tunjangan, bantuan pendidikan, penempatan kembali) f. Tenaga pengajar/ narasumber g. Jurnal Ilmiah h. Penelitian i. Magang j. Short course/ in house training k. Evaluasi pasca diklat dan evaluasi narasumber	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat pada BPSDMD 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	890	Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu : a. Sertifikasi Kompetensi b. Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan Tenaga Pengajar c. Pengendalian Mutu Diklat d. Kerjasama Penyelenggaraan Diklat e. Karya Tulis/ Lokakarya f. Kurikulum, Silabi dan Modul g. Metode Pembelajaran (kuliah, Ceramah, Simposium, diskusi kuliah lapangan, kurikulum, karya tulis)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu pada BPSDMD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	890	Pengembangan Kompetensi Teknis : a.Pengembangan Kompetensi /Diklat Teknis Umum b.Pengembangan Kompetensi /Teknis Inti c.Pengembangan Kompetensi/ Teknis Pilihan d.Praktek Lapangan/Observasi Lapangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada BPSDMD
	890	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional : a.Pengembangan Kompetensi/Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional b.Pengembangan Kompetensi/Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional c.Pengembangan Kompetensi/Diklat Teknis Jabatan Fungsional d. Praktek Lapangan/Observasi Lapangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional pada BPSDMD
	890	Pengembangan Kompetensi Managerial : a.Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan b.Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Daerah c.Pendidikan Dasar bagi CPNS d. Visitasi/Benchmarking e. Inovasi Kepemimpinan.	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan Kompetensi Managerial pada BPSDMD
III. KEUANGAN						
	900	Keuangan meliputi a. Nota Keuangan b. APBN c. APBD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Anggaran pada BPKAD 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	910	Anggaran, meliputi : a. Keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan OPD/PPKD, pemimpin dan pejabat keuangan, pejabat teknis BLUD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. DPA/DPPA/DPAL-OPD/PPKD c. Anggaran kas d. Surat Penyediaan dana (SPD)		penegak hukum		Kas Daerah pada BPKAD 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	920	Akuntansi yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi pada BPKAD
	930	Perbendaharaan meliputi surat perintah pencairan dana (SP2D), surat penolakan penerbitan SP2D dan daftar penguji SP2D	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan Dan Pengelolaan Kas pada BPKAD
	940	Pembinaan kebendaharaan yaitu bintek/kursus yang berkaitan dengan keuangan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Anggaran pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	950	Pengelolaan kas daerah meliputi a. Laporan pemotongan IWP, taperum, pph 21 dari gaji b. Laporan rekapitulasi penerimaan daerah c. Daftar pemotongan dan penyetoran pajak (ppn/pph) dari CV/PT/instansi d. Surat tanda setoran (STS) e. Laporan realisasi daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran f. Rekonsiliasi meliputi surat penerimaan, laporan bank	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha di masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	950	g. Laporan mutasi penempatan deposito h. Surat perintah transfer uang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	960	Evaluasi dan Pengendalian meliputi Tuntutan (ganti rugi dan perbendaharaan), Evaluasi dan perubahan APBD Kab/Kota serta pertanggungjawaban APBD Kab/Kota, Edaran keuangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Program pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	960	Penjualan kendaraan dinas melalui lelang	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Aset pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	961	Laporan Hasil Pemeriksaan (Inspektorat dan BPK)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bidang pada BPKAD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	970	PENDAPATAN Perimbangan Keuangan Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi Bangunan (PBB) Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pajak pada BPPD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam/Migas Subsidi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengembalian & Pemanfaatan Air Permukaan, Pajak Reklame				Daerah
	970	Retribusi bidang kesehatan, bidang seni budaya dan pariwisata, bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan (termasuk pasar) Retribusi bidang pertanian dan peternakan (termasuk pemotongan hewan) Retribusi bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir dll) Retribusi penggunaan air bawah tanah	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Retribusi pada BPPD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	970	Retribusi bidang perkebunan dan kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dll) Retribusi bidang perikanan dan kelautan Retribusi bidang pertambangan, pemanfaatan air permukaan dan metrologi Cukai Retribusi bidang lainnya (termasuk sampah)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Retribusi pada BPPD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	970	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Pajak Retribusi Bunga Deposito Bunga Tabungan Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR) Sumbangan Pihak Ke Tiga (Kendaraan (Dealer),	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pajak pada BPPD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kayu) Penerimaan lain-lain Penerimaan kembali kredit BKK Ternak tidak layak bibit Sewa Internet Penerimaan Dari Dana Bergulir/Revolving Kerjasama Dengan BUMIDA Penerimaan DUKS				
	970	Pengolahan data pendapatan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) Pengembangan sistem informasi pendapatan Pengembangan potensi dan pengembangan pendapatan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengolahan dan Pengembangan Pendapatan BPPD 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBTANTIF PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
I. PEMERINTAHAN						
	120	PEMERINTAH PROVINSI Monografi, Tambahkan Kode Wilayah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otda Dan Kerjasama
	120	Kebijakan Pemerintah Provinsi Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Instansi Vertikal Kerjasama Antar Provinsi/Daerah, Dan Luar Negeri Gubernur, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, Dan Sebagainya Wakil Gubernur, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan Dan Sebagainya Sekretaris Daerah, meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan Badan-Badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama
	120	Penyerahan Urusan/SPM				Sekretariat , Bidang Promosi PM pada Dinas PMD PTSP
	120	Pemindahan Ibukota Provinsi Pemberian Dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan Penyerahan Urusan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	120	Pembentukan / Pemekaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama
	120	Pembentukan Daerah Otonom	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama
	120	Pembentukan Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU , Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama
	120	Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU , Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama
	120	Pemekaran Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU , Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama
	120	Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU dan Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama
	120	Pembagian Wilayah Pemerintahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU dan Bagian Pemerintahan pada

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				pengawasan serta penegak hukum		Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama
	130	Wilayah Kecamatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU dan Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama
	140	PEMERINTAH DESA APBDes/Kel Permasalahan Batas Desa/Kelurahan Penghapusan Desa/Kelurahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian Pemerintahan pada Biro Kesra 2. Bagian TU dan Bidang Penataan Desa pada Dispermasdesduk capil
	160	DPRD a. Pencalonan, pengangkatan, pengambilan sumpah, pelanggaran,	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Persidangan pada Sekretariat DPRD
	160	b. Pemberhentian antar waktu, meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan c. Alat kelengkapan dewan (pimpinan badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, alat kelengkapan lain/pansus) d. Persidangan (rapat-rapat : paripurna, paripurna istimewa, pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, PANSUS, komisi, gabungan komisi, konsultasi, kerja, dengar pendapat, dengar pendapat umum, pemandangan umum, fraksi) e. Fraksi (tata tertib, kode etik) f. Reses, peninjauan/kunjungan lapangan, kunjungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Persidangan pada Sekretariat DPRD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		kerja/study banding/konsultasi g. Kesejahteraan, keuangan dan penghargaan h. Hak				
	180	HUKUM Kontitusi Dasar Negara Undang Undang Dasar Undang Undang Peraturan pemerintahan Perpres/Inpres Permen/inmen Tap MPR Konvensi Perdata Pidana				Kewenangan Pusat
		Perundangan tingkat provinsi meliputi perda, peraturan gubernur /intruksi gubernur Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota meliputi Peraturan Daerah, Peraturan bupati/Peraturan Walikota Perundangan Tingkat Desa Meliputi Peraturan Desa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Perundang-undangan Dan Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota dan JDI Hukum pada Biro Hukum
		Perundangan Tingkat Desa Meliputi Keputusan Kepala Desa	Rahasia	Pengguna dari internal yang mempunyai hak akses	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	180	Perundangan tingkat Provinsi meliputi Kepgub Perundangan Tingkat Kab/Kota Meliputi KepBup/KepWal Keppres, Kepmen Peradilan Umum, Peradilan Negeri Tingkat Pertama Peradilan Tinggi, Mahkamah Agung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Perundang-undangan dan Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota dan JDI Hukum pada Biro Hukum
	180	Peradilan Tata Usaha Negara	Rahasia	Pengguna dari internal yang mempunyai hak akses	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum
	180	Peradilan Agama Islam Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Agama Islam Mahkamah Islam Agung Mahkamah Militer Tingkat Pertama Mahkamah Militer Tinggi Mahkamah Militer Agung Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Tata Usaha Negara Peradilan Tingkat Pidana Korupsi Peradilan Hak Asasi Manusia Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial Ombustmen	Terbatas			Kewenangan Pusat
	180	Upaya Hukum Banding Kasasi Derden Verset Peninjauan Kembali	Terbatas			Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Grasi, Amnesti, Abolisi Eksekusi Pembinaan Hukum, meliputi Kadarkum Bantuan Hukum, meliputi LBH Hukum Internasional Imigrasi Visa Paspor Exit Reentry Lintas Batas/Batas Antar Negara Kepenjaraan Registrasi Narapidana Pembinaan Narapidana Pembebasan Narapidana				
	180	Tahanan titipan Kejaksaan Penuntutan Umum Penuntutan Khusus Hukum Adat	Terbatas			Kewenangan Pusat
	200	POLITIK Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara Kesatuan Bangsa Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan ipoleksosbud hankam Orde Baru Orde Reformasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan pada Badan Kesbangpol 2. Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	210	Partai Politik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL Program Kerja, data kegiatan PARPOL Pembinaan PARPOL Hasil Munas/Musda PARPOL Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL Data Inventaris dan Keuangan PARPOL Partai/Organisasi Terlarang Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang Daftar dan data pengurus anggota partai/organisasi terlarang Ijin Meninggalkan tempat/domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang Daftar berkala mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan pada Badan Kesbangpol 2. Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan,Otda dan Kerjasama
	220	Organisasi Kemasyarakatan Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat,Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol
	220	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	220	Verifikasi dan rekomendasi hibah Ormas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol
	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol
	240	ORGANISASI PEMUDA Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat ,Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol
	250	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat,Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Daftar inventaris kekayaan organisasi				
	260	ORGANISASI WANITA Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol
	260	Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol
	270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH) Pencalonan Nomor Urut/Tanda Gambar Kampanye Dana Kampanye Petugas Pemilu Pemilih/Daftar Pemilih Sarana (TPS, Kendaraan, Surat Suara, Kotak Suara) Pemungutan Suara/Penghitungan Suara Hasil Pemilu Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif Penetapan pemenang pilkada	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol 2. Bagian Otonomi Daerah dan Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama
	270	Verifikasi dan rekomendasi hibah KPU	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				penegak hukum		
	280	PENGAWASAN PEMILU/PILKADA Pemantauan Pelanggaran Sengketa Panwaslu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol 2. Bagian Otonomi Daerah dan Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama
	280	Verifikasi dan rekomendasi hibah Bawaslu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol
	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP
	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ ancaman keamanan/ketertiban umum Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP (Tibum Tranmas), Bidang Pembinaan Masyarakat/Binmas pada Satpol PP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	300	Pengawasan Trantibum Penegakan Pelaksanaan Perda Pembinaan/Penyuluhan pelanggaran Perda Patroli Wilayah Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing Pengamanan Pengawalan Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum Tranmas) dan Bidang Penegak Produk Hukum Daerah (Gakprokumda) pada Satpol PP
	310	PER TAHANAN Darat, Laut, Udara Ketahanan Bangsa Ketahanan Ekonomi Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan Pusat
	330	KEAMANAN Kepolisian Polisi Pamong Praja Huru-hara/Demonstrasi Senjata Api/Tajam Bahan Peledak Perjudian Surat-surat kaleng Pengaduan Masyarakat Himbauan atau Larangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum Tranmas) dan Bidang Penegak Produk Hukum Daerah (Gakprokumda) pada Satpol PP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	330	Bahan Laporan : <ul style="list-style-type: none"> - Data Eks Narapidana Teroris - Data Jaringan Intelijen - Data Penanganan Konflik/Penyelesaian Konflik Sosial yang masih berjalan - Laporan Rakor Pengamanan 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan pada Kesbangpol
	330	Hasil Pelaksanaan Monitoring Penanganan ideologi/faham lain <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Data Pengurus Anggota Organisasi Terlarang - Daftar Berkala tentang keadaan anggota Organisasi Terlarang Laporan Umum (Kondisi, Jumlah Kekuatan) mengenai Organisasi Terlarang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Pada Kesbangpol
	330	Bendel Rahasia Intelijen meliputi : Dokumen Faham Lain <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Gafatar - Dokumen Persebaran HTI - Data Organisasi Terlarang/PKI - Data Napi teroris - Data Radikal Kanan - Data Jaringan Intelejen 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Pada Kesbangpol
	340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas Pembinaan dan Diklat Pengangkatan/pemberhentian anggota Linmas Pendidikan/latihan Linmas Pelatihan PAM Swakarsa Pendidikan/latihan MENWA Pengerahan dan pengendalian Linmas Kesejahteraan bagi anggota Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada Satpol PP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas Santunan uang duka bagi anggota Linmas Penghargaan bagi anggota Linmas				
	340	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa Linmas Lanjut Usia Orientasi Kesadaran Bela Negara Kegiatan Pelaksanaan Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada Satpol PP
	350	KEJAHATAN Makar/Pemberontakan/Terrorisme Pembunuhan Penganiayaan/Pencurian/Perampasan Subversi/Penyeludupan/Narkotika Penipuan dan Pemalsuan Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		Kekerasan pada perempuan dan anak Pelaporan Penanganan korban Kenakalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas PPPA DALDUK KB

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kejahatan lainnya (trafficking, hipnotis, dll)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat , Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan pada Dinas PPPA DALDUK KB
	360	BENCANA Pelatihan, Posko Bencana Surat Keputusan, Berita Acara, MOU, Koordinasi Gunung Merapi/Gempa/Tsunami Banjir/Tanah Longsor/Angin Topan Kebakaran/Kekeringan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Penanganan Darurat pada BPBD
	370	KECELAKAAN Latihan SAR Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam Pelatihan manajemen bagi pejabat Satkorlak dan Satlak PBP Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP Latihan ketrampilan pemadam kebakaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Penanganan Darurat pada BPBD
	370	Kecelakaan Darat, Laut, Udara Investigasi/penyelidikan kecelakaan Asuransi Kecelakaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Penanganan Darurat pada BPBD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Perencanaan Perencanaan teknis Rekomendasi Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana dengan pihak lain Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi PUSDALOPS Kunjungan lapangan Relawan Laporan Bencana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD
	390	Kerjasama BPBD dengan instansi lain Inventarisasi Pokok-pokok pikiran DPRD Prov. Jawa Tengah dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana Percepatan Perubahan Peraturan Permendagri/Peraturan Daerah	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat pada BPBD
	390	Berita Acara Hibah Peralatan BNPB Berita Acara Pinjam Pakai Peralatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Logistik Dan Peralatan pada BPBD
	390	Rekomendasi Bantuan Peralatan Peralatan Rapat Koordinasi PBD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Logistik Dan Peralatan pada BPBD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	390	Kegiatan dari instansi luar BPBD terkait Pencegahan dan Kesiap siagaan Surat Keputusan Kegiatan Penanggulangan Bencana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pencegahan Dan Kesiap siagaan pada BPBD
	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa pada Dispermasdes dukcapil 2. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan KB pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	410	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN Gotong-royong Swadaya gotong royong Pembinaan Pungutan Lembaga Sosial Desa (LSD) Latihan kerja masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Penyuluhan Masyarakat Desa Kelembagaan Desa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Perekonomian Desa Pembiayaan Pembangunan Desa Inventarisasi Data	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian TU, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Bapermasdes dukcapil 2. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan KB pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	410	Petunjuk/Pembinaan/Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	1. Bagian TU, Bidang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bantuan/Stimulasi Perkreditan Desa Pelaporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Koperasi Desa Badan Usaha Unit Desa (BUUD) Koperasi Unit Desa (KUD) Sarana dan Prasarana Desa Pemukiman kembali penduduk Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa Perbaikan Kampung Teknologi Tepat Guna (TTG) Pengembangan Desa Perlombaan Desa dan Kelurahan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri, Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga lainnya		kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Perangkat Daerah	Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Bapermasdes dukcapil 2. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan KB pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	420	PENDIDIKAN Kebijakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang pada Dinas Dikbud 2. Bagian Dikbudpora dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	420	Ijazah, sertifikat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pembinaan SMA/SMK/Dikus pada Dinas Dikbud 2. Bagian Dikbudpora dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	420	Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pendidikan Khusus pada Dinas Dikbud 2. Bagian Dikbudpora Dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	420	Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSPEK Tahun Pelajaran Hari Libur Kegiatan pelajar diantaranya reuni, darmawisata, widyawisata, lomba-lomba (LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains, Pelajar teladan, pertukaran Pelajar)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pembinaan SMA/SMK dan Dikus pada Dinas Dikbud 2. Bagian Dikbudpora Dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	420	Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kurikulum Karya Tulis, Karya Ilmiah Ujian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang SMA, SMK, Dikus pada Dinas Dikbud 2. Bagian Dikbudpora Dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rak

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						yat
	420	Sarana Pendidikan(buku, perlengkapan pendidikan) Bangunan Pendidikan (Laboratorium; Perpustakaan) Gedung Sekolah Kampus Pusat Kegiatan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang SMA, SMK, Dikus pada Dinas Dikbud 2. Bagian Dikbudpora Dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	420	Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi) Pertukaran Guru ke Luar Negeri Sertifikasi Guru	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Ketenagaan Dikbud pada Dinas Dikbud 2. Bagian Dikbudpora Dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	420	Sistem Informasi dan TIK pendidikan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang BP TIKP pada Dinas Dikbud 2. Bagian Dikbudpora Dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	426	KEOLAHRAGAAN Pembinaan Keolahragaan Olah Raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade) Olah Raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll) Olah Raga Rekreasi /Massal (Senam, sepeda santai, olah raga tradisional) Iptek dan Industri Olah Raga Sarana Prasarana Keolahragaan Kemitraan Olah Raga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata 2. Bagian Dikbudpora Dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	427	KEPEMUDAAN Pertukaran Pemuda Paskibraka Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja Kemitraan Pemuda Karang Taruna Kepramukaan/Kepanduan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata 2. Bagian Dikbudpora Dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	430	KEBUDAYAAN Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan Pembinaan bidang kebudayaan Kesenian Cabang Kesenian (Seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dll)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Dikbud 2. Bagian Dikbudpora Dan Keagamaan pada Dinas Dikbud

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	430	Sarana Gedung Kesenian Padepokan Lembaga Adat Kegiatan adat/tradisi Usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan : festival, pentas seni Kepurbakalan Museum Peninggalan Kuno Candi, termasuk pemugaran Benda Sejarah Bahasa	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Dikbud 2. Bagian Dikbudpora Dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	430	Penghayat Kepercayaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Dikbud 2. Bagian Dikbudpora Dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	440	KESEHATAN Kebijakan dan Program Pembangunan kesehatan (Pelayanan Kesehatan, Penanggulangan kesehatan, kesehatan masyarakat, SDK, Sekretaris) SOP Praktek Klinik Laporan Bulanan (PTRM/HIV AIDS/TB DOT)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang pada Dinas Kesehatan 2. Sekretariat, Bidang pada RSUD/RSJD Prov Jateng

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	440	Jiwa Perawatan Obat-obatan (penyimpanan dan pengawasannya) Pengadaan Obat Terlarang Kelamin, HIV, AIDS, IMS Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum) IGD; ICU IBS MCU (Medical Check Up) Farmasi Laboratorium Klinik, Patologi, Anatomi, Forensik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang SDM Dan SDK, Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan 2. Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang, Bidang Keperawatan, Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Laboratorium pada RSUD/RSJD Prov Jateng 3. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	440	Bank Darah Rumah Sakit Sanitasi Rumah Sakit CSSD/Laundry Kasus Hukum Rumah Sakit Tenaga Medis Perencanaan Tenaga Medis Perijinan untuk Tenaga Medis Standarisasi Penyimpanan Distribusi IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang, Bidang Umum, Instalasi CSSD pada RSUD Prov. Jateng 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat
		Rekam Medis	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penunjang, Instalasi Rekam Medik pada RSUD/RSJD Prov. Jateng 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	440	Gigi Mata Kesehatan Ibu dan Anak JPBKS (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi Kesehatan, SDK

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		JAMKESMAS JAMKESDA JAMPERSAL Jaminan lainnya Pemeriksaan obat Distribusi obat Obat Generik T.B.C Kusta Frambusia Kholera SARS, dan jenis penyakit lainnya Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B) Malaria Dengue Haemorrhagic Fever (DHF), DBD Filaria Serangga		akses		Dan Pencegahan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan 2. Bidang Pelayanan, Bidang Keperawatan, Bidang Penunjang, Bidang Keuangan, Bagian Umum, Bagian Perencanaan pada RSUD/RSJD Prov. Jateng 3. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	440	Rabies Antrak Leptosirosis Chikungunya Penyakit lainnya Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular A. Pektoris IMA (Irama Mastcmik Akut) HipeRumah Tanggaensi Stroke Diabetes Melitus Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Serviks, Mammae, Hepar, Paru dan lainnya	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pencegahan Penyakit Menular(P2M) pada Dinas Kesehatan 2. Kepala Instalasi pada RSUD Prov Jateng 3. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	440	Epidemiology dan Karantina (Epidka) Imunisasi Surveilanse Pestisida Pencemaran Jamban Keluarga Kesehatan Institusi Higiene sanitasi Tempat-tempat makanan minuman Sarana air minum Pestisida, insektisida Pencemaran Jamban keluarga, sanitasi rumah tangga Kesehatan institusi, misal : Poskestren, sanitasi masjid Higiene sanitasi CA. Mammae Higiene sanitasi CA. Hepar	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan 2. Sekretariat, Bidang Pelayanan dan Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prov Jateng 3. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Higiene sanitasi CA. Paru Kejadian Khusus Dekompensasiokardosis (serangan jantung) Asma Psikosis PPOM Kecelakaan Lalu Lintas Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi dan Pengawasan Makanan Kekurangan Makanan Bahaya kelaparan, busung lapar, gizi busuk Keracunan makanan Menu makanan rakyat Gondok endemik (GAKI) Keperawatan Komite Medik Rawat Inap Rawat Jalan RSU, RSJ, RS Khusus Studi Banding Rumah Sakit Penunjang Medis Radiologi				Biro Kesejahteraan Rakyat
	440	Gizi Mutu Rumah Sakit Akreditasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Promosi Layanan Kesehatan Pendayagunaan Tenaga Medis Kegiatan Bakti Sosial Tenaga Medis TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia) Diklat Tenaga Kesehatan/Medis Diklat Tenaga Kesehatan/Para Medis	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 2. Bidang Layanan RSUD Prov Jateng 3. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pendidikan di Bidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis Perlatan Kesehatan Perijinan berkaitan dengan Alat Kesehatan Pengobatan Alternatif Pijat Akupuntur				Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	440	SPI (Satuan Pengawas Internal) ISO PSBH (Problem Solving for Better Hospital) Jamu dan herbal Dukun Lembaga penyedia layanan kesehatan PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling Poliklinik dan Balai Kesehatan Rumah Bersalin Posyandu Laboratorium Kesehatan Sanatorium Kesehatan Kanker UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb Pemalsuan obat Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit menular langsung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi Kesehatan, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan 2. Tim SPI dan Mutu, Tim ISO, Bidang Layanan Kesehatan pada RSUD/RSJD Prov Jateng 3. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	440	RSU, RSJ, RS Khusus PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling Poliklinik dan Balai Kesehatan Rumah Bersalin Posyandu Laboratorium Kesehatan Sanatorium Kesehatan Kanker UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb Pemalsuan obat Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular langsung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 2. Bidang Pelayanan Kesehatan, Perijinan pada RSUD Prov Jateng 3. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	440	Perijinan untuk tenaga medis meliputi surat ijin praktek dan surat ijin kerja	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan 2. Bidang Pelayanan Perijinan pada RSUD/RSJD Prov Jateng 3. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	450	AGAMA Kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaan				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		dan pengawasan bidang keagamaan				
		Bantuan dibidang keagamaan Islam Peribadatan (Sholat, Zakat, Puasa, Haji/Umroh) Infaq. Shodaqoh Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau) Tokoh Agama Pendidikan Agama Pendidikan Tinggi Agama Menengah, MTs, MA Dasar, Pra Sekolah, MI Lembaga pendidikan Non Formal (TPQ/ Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll) Sarana pendidikan meliputi buku, gedung sekolah dll	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Kewenangan Pusat 2. Bagian Dikbudpora Dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	450	Tenaga Pengajar Dakwah (Pengajian, MTQ) Wakaf Mazhab Agama Islam Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll) Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i) Kristen Protestan, Katholik (Peribadatan, Rumah Ibadah Gereja dll) Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll) Mazhab, Organisasi Gerejani Hindu, Budha dan Kong Hu Cu Peribadatan Rumah Ibadah(Pura, Candi, Vihara, Klenteng) Tokoh Agama, Rohaniawan Mazhab, Organisasi Agama	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Kewenangan Pusat 2. Bagian Dikbudpora Dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	460	SOSIAL Rehabilitasi Penyandang Cacat Cacat Ganda Cacat Fisik Cacat Mental/Eks Psikotik Rehabilitasi Sosial Pengemis, Gelandangan/Orang Terlantar(PGOT) Anak jalanan Tuna Susila Anak Nakal Tuna Wisma Lanjut usia	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	460	Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan pemerintahan.	1. Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	460	Keperintisan dan Kepahlawanan Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya. Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan. Veteran Cacat Veteran Kesejahteraan Sosial	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	460	Taman Makam Pahlawan (TMP) Penyelenggaraan Undian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	460	Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat Sosial : Karang taruna Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Organisasi Sosial (Orsos) Dunia Usaha	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	460	Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tenaga Pelopor Perdamaian Program Keluarga Harapan (PKH)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Rakyat
	460	Masyarakat miskin : Raskin, BLT dll Masyarakat Miskin Pedesaan Masyarakat Miskin Perkotaan Pengelolaan Data Kemiskinan Sumbangan Sosial	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Fakir Miskin pada Dinas sosial 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Sosial
	460	Korban Bencana Jaminan Sosial Pencarian dana untuk sumbangan : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar dsb Panti Asuhan Bimbingan Sosial Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya PMI Makam Umum Pahlawan Khusus, Keluarga, Raja Krematorium	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	460	Kualitas Hidup Perempuan Perlindungan Perempuan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kejahatan Lainnya (Trafficking, hipnotis, dll) Kesejahteraan Anak Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) Perlindungan Anak Kesejahteraan Anak dan Keluarga	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Kualitas Hidup, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang pemenuhan Hak dan Perlindungan anak pada Dinas PPPADALDUK KB 2. Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan KB pada Biro Kesjahteraan Rakyat
	460	Kekerasan pada Perempuan dan Anak Pelaporan Penanganan Korban	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas PPPADALDUK KB 2. Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 3. Bagian Pemberdayaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Masyarakat Dan KB pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan Pendaftaran Penduduk Identitas Penduduk Biodata Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Fasilitas Pelayanan Adminisitrasi dan kependudukan pada Dispermadesduk capil 2. Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan KB pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	470	TRANSMIGRASI Penyiapan informasi daerah transmigrasi Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi Permasyarakatan/sosialisasi transmigrasi Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi Kerjasama di bidang transmigrasi Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Disnakertrans 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pemukiman transmigrasi Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/ peta informasi pemukiman Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum /social dan jaringan transportasi Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi Tata ruang pemukiman transmigrasi Rancangan dan pemanfaatan areal tanah				
	470	Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan Pengerahan Pendaftaran dan seleksi calon transmigran Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Disnakertrans 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	470	<p>Rancangan kapling TSM</p> <p>Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum</p> <p>Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah</p> <p>Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah</p> <p>Pengukuran batas unit pemukiman</p> <p>Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah</p> <p>Sarana pemukiman transmigrasi</p> <p>Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih</p> <p>Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi</p> <p>Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana</p> <p>Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan</p> <p>Pengerahan, pemindahan dan penempatan</p>	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Disnakertrans 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	470	<p>Pemberangkatan transmigran</p> <p>Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat</p> <p>Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan</p> <p>Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan</p> <p>Pengawasan perjalanan transmigran</p> <p>Pengaturan rute pemberangkatan</p> <p>Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan</p> <p>Penempatan Transmigran</p> <p>Kesiapan lokasi dandaya tampung</p> <p>Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina</p> <p>Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap</p>	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Disnakertrans 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat

KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	3	4	5	6	7
	<p>UPT</p> <p>Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti Penampungan transmigrasi (transito), pelatihan transmigran dan program/metode pengajaran Penyusunan silabus dan modul pelatihan Penyusunan calonpeserta/pelatih Penampungan transmigran di transit Pelayanan kesehatan bagi transmigran Pelayanan makanan bagi transmigran Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran Pembinaan masyarakat transmigrasi Identifikasi dan peninjauan pembinaan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan Pembinaan Pendidikan, Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan, Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan danstatus, Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat Pembinaan kesehatan Penyediaan sarana kesehatan dan KB Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa Pendistribusian bantuan pangan Pembinaan rohani</p>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	470	Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama Bimbingan adaptasi masyarakat Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial Pelayanan pos di daerah transmigrasi Penyerahan UPT yang layak untuk di serahkan Penilaian transmigran teladan Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Disnakertrans 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	470	KELUARGA BERENCANA Alat Kontrasepsi Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri Penyuluh Lapangan KB (PLKB) Pos KB desa, Akseptor KB	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Keluarga Berencana, Sekretariat Advokasi KIE pada Dinas PPPADALDUKKB 2. Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dan KB pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	480	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kominfo

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	480	<p>MEDIA MASSA</p> <p>Surat Kabar, Majalah, Buletin, Jurnal</p> <p>Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik</p> <p>Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok</p> <p>Perekonomian dan Perbankan</p> <p>Bidang lainnya</p> <p>Layanan Informasi/Leaflet</p> <p>Masukan Analisis Gubernur</p> <p>Televisi</p> <p>Film Dokumenter</p> <p>Kewartawanan/Jurnalistik</p> <p>Pembentukan Organisasi Profesi</p> <p>Kasus-kasus kewartawanan</p> <p>Penyalahgunaan Profesi</p> <p>Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan</p> <p>Wartawan</p> <p>Musyawaharah Wartawan Indonesia</p> <p>Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan</p> <p>Temu Pers/Konferensi Pers. Pers Tour</p> <p>Kunjungan Wartawan Asing</p> <p>Penyuluhan Masyarakat, Publikasi</p> <p>Lembaga Komunikasi Masyarakat, Lembaga</p> <p>Pemerintah</p> <p>Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan</p> <p>Training Fotografi, Training Berita Jurnalistik</p> <p>Bintek Infokom</p> <p>Rakorda Infokom</p>	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	480	Media Cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran Radio Pengawasan Lembaga Penyiaran Kelompok Pemantau Isi Siaran Pengkajian Isi Siaran SDM Penyiaran Periklanan Ketentuan Pemasangan Reklame Pameran	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
	480	Pendirian Information Center Pembinaan Bidang Infokom Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah Wahana Komunikasi Masyarakat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Promosi Luar Negeri Kunjungan Wartawan Asing Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif Dialog Interaktif, Rubrik Materi /Pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif Pembuatan Kolom Khusus Hasil Pembangunan Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan Musyawarah Wartawan Indonesia Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan Temu Pers/Konferensi Pers	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Statistik pada Dinas Kominfo

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Penyuluhan Masyarakat Publikasi Training Fotografi Training Berita Jurnalistik Bintek Infokom Rakorda Infokom Lembaga Komunikasi Masyarakat Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Statistik pada Dinas Kominfo
	480	Rakor Pengendalian Kegiatan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat pada Dinas Kominfo
	480	Pengelolaan website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang E-Government pada Dinas Kominfo
	500	PEREKONOMIAN Dewan stabilisasi Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, klasifikasi pada masalahnya	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang pada Disperindag 2. Bagian Perindag dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian
	500	Perizinan pada umumnya untuk perizinan sesuai bidang, klasifikasi pada masalahnya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas PMD dan PTSP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						2. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata pada Biro Perekonomian
	510	PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Disperindag 2. Bagian Perindag dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian
	510	Promosi perdagangan Pekan raya Pameran Pelelangan, distribusi Pemasaran Sembako Penentuan harga pokok Bina usaha dan sarana perdagangan Rencana dan program kerja Beras, Garam Minyak Tanah, Minyak Goreng, Sabun dll Pemasaran Pertokoan, Kaki Lima, Kios, Pusat Perbelanjaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Promosi pada Disperindag 2. Bagian Perindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	510	Pasar Ekspor Ijin ekspor Perdagangan luar negeri Manajemen perdagangan internasional Pemberitahuan ekspor barang	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perdagangan pada Disperindag 2. Bagian Perindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian
	510	Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll) Penerbitan SIUP Perpanjangan Ijin prinsip Rekomendasi Perdagangan antar Pulau Kerjasama bahan baku Industri pemasaran Kontrak Tera dan Tera Ulang, Biaya tera, Cap tanda tera Takaran, Timbangan dan anak timbangan	Dialihkan ke Kabupaten/Kota			1. Sekretariat, Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas PMD dan PTSP 2. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal Dan Pariwisata pada Biro Perekonomian
	510	Kalibrasi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat , Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) pada Disperindag 2. Bagian Perindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	510	Perdagangan antar pulau Aneka Usaha Perdagangan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Disperindag 2. Bagian Perindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian
	510	Impor Ijin Impor Pemberian ijin Pengendalian ijin				Untuk ijin impor dialihkan ke Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP
		Standart Mata Dagang Import Management Perdagangan Internasional Kegiatan Import Pembinaan Import Pengendalian Import Pemantauan Import Faktor-faktor Pendukung Pengawasan Mutu Barang Import Penyaluran Kegiatan Import Bahan Konsumsi Bahan Baku Bahan Penolong Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import Usaha Negara (Perjan, Perum, Persero) Perusahaan Daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perdagangan dalam Negeri pada Disperindag 2. Bagian Perindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	510	Kerjasama Bahan Baku Industri Pemasaran Kontrak Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri Promosi dan Informasi Kerjasama Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan Peti Kemas Tangki Penyimpanan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag 2. Bagian Perindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian
	510	KOPERASI Bina Usaha Koperasi Koperasi Pertanian	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bagian Produksi pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Perindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian
	510	Koperasi Non Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bagian Produksi pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Perindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	510	Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha kecil Usaha Mikro Kecil dan Menengah Permodalan Koperasi Pemupukan Modal Pemanfaatan Modal Perbankan dan Asuransi Permodalan Luar Koperasi Kredit Program Umum Kredit Program Khusus Distribusi dan Jasa Koperasi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Restrukturisasi pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Perindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian
	510	Distribusi Bahan Pokok Distribusi Aneka Bahan Distribusi Kerjasama Niaga Jasa Angkutan Jasa Perumahan Aneka Jasa Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi Bina Lembaga Koperasi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Usaha Dan Pemasaran pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Perindag dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian
	510	Organisasi Koperasi Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi Pemberian Badan Hukum Koperasi Penyelesaian Pembubaran Koperasi Keragaman Koperasi Pengakuan Koperasi Sekolah Amalgamasi Tertib Organisasi Koperasi Penyelesaian Penyelisihan/Persengketaan Bimbingan Kesadaran Hukum Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Kelembagaan pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Perindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	510	Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pengurus dan Badan Pemeriksa Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Kelembagaan pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Perindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian
	510	Bina Tata Laksana Koperasi Klasifikasi Koperasi Pedesaan Klasifikasi Koperasi Perkotaan Klasifikasi Koperasi Sekunder Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi Administrasi Koperasi Pedesaan Administrasi Koperasi Perkotaan Karyawan/Manager Koperasi Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) Penyaluran Alat Sekolah Bantuan Pemda kepada Koperasi/KUD Akuntansi Akuntansi Koperasi Pedesaan/Perkotaan Akuntansi Koperasi Sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Kelembagaan pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Perindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian
	510	Pengawasan Koperasi Pengawasan Koperasi Primer Pengawasan Koperasi Sekunder Koperasi Jasa Audit Pengawasan Usaha Pengawasan Usaha Mikro Pengawasan Usaha Kecil	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pengawasan pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Perindag Dan Koperasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pengawasan Usaha Menengah				UKM pada Biro Perekonomian
	510	Kerjasama Kantor Akuntan Penyuluhan Koperasi Pembinaan Kader Koperasi Masyarakat Umum Forum Komunikasi Kelompok Tani Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL) Penilaian Tingkat Nasional Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha Mikro Pembinaan Usaha Kecil Pembinaan Usaha Menengah	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Kelembagaan pada Dinas Koperasi Dan UKM 2. Bagian Perindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian
	520	PERTANIAN Tanaman Pangan Rencana dan Program Bimas/Inmas Termasuk Kredit Pelaporan dan Evaluasi Pertanian Produksi Padi Palawija Panen Gagal (Puso)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				penegak hukum		Perkebunan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	Sarana Usaha Pertanian Peralatan Meliputi traktor dan sebagainya Pembenihan dan pembibitan Pupuk	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang tanaman pangan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	Irigasi Pertanian Rehabilitasi Lahan Pertanian Tanah Pertanian Pangan Persawahan Perladangan Kebun Pengusaha, Petani Lahan kritis	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Perlindungan Tanaman Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan Penyakit Tanaman Pangan Hama tanaman pangan Pemberantas Pestisida Agensia Pengendalian Hayati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan 2. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada BPSDMD
	520	Pemasaran dan Promosi Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Penyuluhan Pasca Panen dan Bina Usaha pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan 2. Bagian Ketahanan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						SDA
	520	KEHUTANAN Perencanaan Hutan Survey Survey PPA Survey Areal Survey Pembinaan Hutan Survey Potensi Hutan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2. Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	Tata Ruang Kawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perijinan pada Dinas PMD Dan PTSP
	520	PERIKANAN DAN KELAUTAN Perumusan Kebijakan, Rencana, Program, Statistik, Prospek, Evaluasi dan Pelaporan bidang Perikanan dan Kelautan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat pada Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Penyuluhan Pengembangan dan Pemberdayaan Penyuluh Pengembangan SDM Penyuluh Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Pemberdayaan Nelayan Usaha Perikanan Penangkapan Ikan Sertifikasi hasil tangkapan ikan dan cara penangkapan ikan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Kelautan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ijin usaha perikanan tangkap Penerbitan buku kapal perikanan, Pendaftaran kapal Teknologi Produksi Perikanan Standarisasi Mutu Hasil Perikanan	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Perikanan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Perjanjian Kerjasama Nelayan Andon dengan Profesi Lain Pengendalian Sumber Daya Ikan, Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas, Mediasi, Penyelesaian Konflik antar nelayan Penanganan Tindak Pidana Sumber Daya Kelautan Perikanan Koperasi Kapal Pengawas Perikanan Penetapan Rencana sonasi, pengelolaan dan aksi pengelolaan pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil Pemberian Rekomendasi, Ijin Lokasi dan Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Kelautan, Pengawas Dan Pesisir pada Dinas Kelautan Dan Perikanan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC Sertifikasi Kesehatan Ikan Usaha Perikanan Pelatihan Nelayan Pembinaan wanita nelayan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan Dan Perikanan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Ekspor Hasil Perikanan Impor Hasil Perikanan Pemasaran Dalam Negeri Pengusaha perikanan Sarana Perikanan Rekomendasi ijin Usaha Perikanan (Pembenihan/ Pembesaran) Fasilitas perijinan : SIUP, SIPI, SKP Perbenihan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Permodalan dan Investasi Kelompok Pembudidaya Ikan Pengendalian hama dan penyakit Penyakit ikan Hama ikan Laboratorium Kesehatan Ikan Obat-obatan termasuk sertifikasinya	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	Kepelabuhan Perikanan Pantai Pengembangan Pelabuhan Perikanan Bimbingan Teknis Pelabuhan Perikanan dan Kesyahbandaran TPI/PPI Kesyahbandaran Peralatan penangkapan : kapal, perahu, jaring, pump dsb	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan Dan Perikanan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Konservasi dan Suaka Laut Transplantasi bibit karang Garam Terumbu karang Mangrove Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Harta karun di dalam laut Pembinaan/Pendidikan masyarakat pesisir	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Konservasi pada Dinas Kelautan Dan Perikanan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Produksi Perbibitan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan Budidaya Usaha Peternakan Pelayanan Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran Pengembangan SDM dan Kelembagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Budidaya PSP pada Disnak Dan Keswan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	Peternakan Kesehatan Hewan Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Obat-obat Hewan Pelayanan Kesehatan Hewan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Veteriner pada Disnak Dan Keswan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan Hygieni dan Sanitasi Produk Hewani Laboratorium Kesehatan Hewan Pengujian Mutu Asal Hewan Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan Inseminasi Buatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Balai Inseminasi Buatan (BIB) dan Veteriner pada Disnaker dan Keswan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	Produksi Distribusi dan Pemasaran Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi Pembibitan dan Budi Daya Ternak Ternak Non Ruminansia Ternak Ruminansia	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang BIB, BBPUAT dan BBPTT pada Disnaker dan Keswan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	Perkebunan Kemitraan Kelompok Tani Usaha Perkebunan Program dan Pelaporan Monitoring Statistik Perkebunan Pembibitan / Benih Produksi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Perkebunan dan Balai Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan 2. Bagian Ketahanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan Pemasaran Hasil Perkebunan Perlindungan Tanaman H a m a Pestisida Agensia Pengendalian Hayati				Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	Alat dan Mesin Perkebunan Power Sprayer Hand Sprayer Polibag Alat Laboratorium Perkebunan Reagen Sarana/Alat Produksi Perkebunan Pengolahan lahan Terasering Pemasyarakatan Penyuluhan; Sosialisasi; Informasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Balai ALSIN pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	520	KETAHANAN PANGAN Ketersediaan Pangan Kerawanan Pangan Sumberdaya Pangan Analisis dan Kajian Ketersediaan Pangan Neraca bahan makanan Infrastruktur pangan sumber pangan Program Bimbingan Massal Pengembangan Sarana Sumber Daya Pembinaan Teknologi Sarana Produksi dan Permodalan Kelembagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bagian TU, Bidang Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Agribisnis Mutu Hasil Pengelola Hasil Pangan Pemasaran Hasil Kementriaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian TU, Bidang Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	Distribusi Pangan & Cadangan Pangan Harga Pangan Neraca Pangan Teknisi Harga Pangan Sistem dan Pola Distribusi Sarana dan Prasarana Distribusi Pengadaan dan Cadangan Pangan Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan Keamanan dan Mutu Pangan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Sistem Informasi Pangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian TU pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	Kelembagaan Keamanan Pangan Bimtek & Supervisi Kelembagaan Pangan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Sertifikasi Jaminan Keamanan Pangan Segar Bimtek & Supervisi Pengawasan Keamanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian TU, Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	520	Promosi Penganekaragaman Pangan B2SA Pengembangan Pangan Lokal Inovasi Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Bimtek & Supervisi Pangan Lokal Analisis & Kajian Potensi Pangan Lokal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian TU, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan 2. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	PENYULUHAN Sumber Daya Manusia Kelembagaan Penyelenggaraan Penyuluhan Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan 2. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada BPSDMD 3. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	530	PERINDUSTRIAN Undang-undang Gangguan Industri Logam Industri Mesin/Elektronik Industri Kimia/Farmasi Industri Tekstil Industri Makanan/Minuman	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Agro dan Bidang Non Agro pada Disperindag 2. Bagian Perindag Dan Koperasi UKM pada Biro Perekonomian
	530	Aneka Industri/Perusahaan Home Industri Aneka Kerajinan Pemasaran hasil industri Ekspor hasil industri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pengawasan & Pengendalian pada Disperindag 2. Bagian Perindag Dan Koperasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						UKM pada Biro Perekonomian
	540	ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL Minyak dan Gas Bumi Pengusahaan Perijinan Rekomendasi Kontrak Karya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Energi Baru Terbarukan pada Dinas ESDM 2. Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	540	Pengolahan Penyaluran Tangki, Pompa, Tanker Energi Energi alternatif Gas Rawa Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Biogas Energi baru terbarukan Perijinan Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Pemetaan Energi Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Energi Baru Terbarukan; Bidang Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM 2. Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	540	Pasca Tambang Reklamasi Penutupan Air tanah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Mineral dan Batu Bara; Bidang Geologi Dan Air Tanah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Cekungan Air Tanah(CAT):Pemetaan,Imbuhan,Lepasan Konservasi Pengendalian Daya Rusak Rekomendasi Teknis Sumur Artesis, Sumur Bor, Sumur Gali (Pasak) Pengusaha Pengebor (APATINDO) Sumur Pantau Harga Dasar Air/Nilai Perolehan Air Hidrologi Geologi Pemetaan Mitigasi Bencana Geologi Vulkanologi, Pengawasan Vulkanologi Panas Bumi Hidrogeologi Gerakan tanah (longsoran, amblesan) Pengawasan, pengendalian Hidrologi Kesamudraan Penghematan energi		penegak hukum		pada Dinas ESDM 2. Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	540	Pertambangan, mineral dan batubara Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) WIUP Batuan WIUP Bukan Logam WIUP Logam WIUP Batubara Rekomendasi Teknis Perijinan IUP Eksplorasi IUP Operasi Produksi IUP Operasi Produksi Khusus Ijin Usaha Jasa Pertambangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengawasan & Pengendalian pada Dinas ESDM 2. Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM pada Biro Infrastruktur Dan SDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pencabutan Ijin Pembinaan Pengawasan Pengawasan Usaha Pertambangan Penerbitan Kegiatan Pertambangan				
	550	PERHUBUNGAN Perhubungan Darat Angkutan Jalan Raya Perizinan Trayek Terminal Alat Angkutan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan 2. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata pada Biro Perekonomian
	550	Trayek Angkutan Dalam Trayek Angkutan Tidak Dalam Trayek Angkutan Penumpang Angkutan Barang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pelayanan Perizinan pada BPMD PTSP 2. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata pada Biro Perekonomian
	550	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur) Kecelakaan Lalu Lintas Uji Mutu Keselamatan, Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan Raya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan 2. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata pada

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Biro Perekonomian
	550 550	Lalu Lintas Sungai dan Danau Perizinan Laut Perkapalan Alat Angkutan Angkutan Sungai Keselamatan, Rambu-rambu Alur dan Kolam Pelabuhan Trayek Sarana/Kapal Kecelakaan Perhubungan Laut Pelabuhan Laut Lalu Lintas Angkutan Laut Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu Pelayaran Dalam Negeri Pelayaran Luar Negeri Pelayaran Haji Pelayaran Charter/Wisata Turis Pelayaran Khusus Pelabuhan Alur Layar Terminal Penumpang/kontainer Terminal Keberangkatan Penumpang Terminal Kepulangan Penumpang Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus Pergerukan/Perawatan Alur Pelayaran Kolam Pelabuhan Reklamasi Pantai Dumping Area Pekerjaan Bawah Air (Salvage) Penjagaan Pantai	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan 2. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata pada Biro Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Penjagaan Pantai & Penganggulan Keselamatan di Laut (GAMAT) Patroli Bandar Patroli Perairan Sertifikat Awak Kapal Kecelakaan, Gangguan Kecelakaan Penumpang/Kapal Kecelakaan Barang Gangguan Sarana/Prasarana Pembijakan/Penyelundupan Pencemaran Perijinan Berlayar/Ijin Pembangunan/Ijin Usaha				
	550	Perkereta-apian Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie Prasarana (Jalan/Jembatan) Angkutan Penumpang (perkereta-apian) Angkutan Barang (perkereta-apian) Keselamatan (perkereta-apian) Kecelakaan (perkereta-apian) Perawatan/Perbaikan Perizinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Jaringan Transpotasi & Kereta Api dan Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan 2. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata pada Biro Perekonomian
	550	Perhubungan Udara Lalu Lintas Angkutan Udara Penerbangan Domestik Penerbangan Luar Negeri Penerbangan Haji Penerbangan Charter/Non Reguler Penerbangan Khusus/Jembatan Udara Pelabuhan/Bandar Udara	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Jaringan Transpotasi & Kereta Api dan Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan 2. Bagian Perhubungan,

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	550	Tanah/Lokasi Bandara Landasan Apron Terminal Penumpang Terminal Cargo Perlengkapan Parkir Kendaraan Alat Angkutan Udara Pesawat Udara Dermaga Muatan Dalam Negeri Muatan Luar Negeri EMPU Sertifikasi Kelaikan Kelaikan Pesawat Udara Kelaikan Peralatan Penunjang Keselamatan Rambu-rambu Perakitan/Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Telekomunikasi Penerbangan Asuransi Asosiasi SATPAM Rally Udara/Lomba Perizinan Izin Terbang/Flight Approval Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan/EMPU Pembukaan Kantor Cabang Rekomendasi Ketinggian Bangunan Pembangunan Bandar Udara Khusus				Penanaman Modal dan Pariwisata pada Biro Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	550	POS Pembinaan Kebutuhan fasilitas Rehabilitasi/Perawatan Bina Usaha/Pengawasan/Penertiban Standarisasi Perangkat Tanah/Bangunan Filateli Asosiasi Laporan dan Evaluasi Pelayanan , Jasa Pos/Titipan/Giro				Kewenangan Pusat
	550	Benda Pos/Perangko Sampul Peringatan Jasa Pos Elektronik Perijinan Rekomendasi Usaha Jasa Pos/Titipan Pembukaan Agen/Cabang Gangguan Sarana dan Prasarana Kecelakaan Sabotase Penyeludupan				Kewenangan Pusat
	550	Teknologi Informasi Kebijakan Peralatan Telepon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Dinas Kominfo
	550	Internet/USO Telegram, Telex/SBB, Faximile Satelit, Stasiun Bumi Radio komunikasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Dinas Kominfo

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	550	Sistem Pembinaan/Penertiban Perijinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo
	550	Pariwisata dan Rekreasi Usaha Pariwisata Usaha Jasa Pariwisata Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata Restoran dan Rumah Makan Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Usaha Sarana Pariwisata Ijin Pariwisata Ijin Usaha Pariwisata Ijin Usaha Jasa Pariwisata Ijin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Ijin Usaha Sarana	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal Dan Pariwisata pada Biro Perekonomian
	550	Wisatawan Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara Promosi dan Informasi Pariwisata Dalam Negeri Luar Negeri Perhotelan Status Hotel Kelas Hotel T a r i f Travel Service Pramu Wisata Biro Perjalanan/Angkutan Wisata Souvenir Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal Dan Pariwisata pada Biro Perekonomian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Tempat Rekreasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Ciptaan Tuhan Hasil Karya Manusia Rehabilitasi/Perawatan Pengembangan Fasilitas Tanah/Bangunan				
	550	Bina Usaha Insitusi Asosiasi Lembaga Kepariwisataaan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal Dan Pariwisata pada Biro Perekonomian
	550	Metereologi dan Hidrologi Data Debit Andalan Curah Hujan Klimatologi Hujan Buatan Peneropongan Bintang	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengembangan Pembinaan Teknis pada Dinas PU SDA dan Tata Ruang 2. Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur dan SDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	560	TENAGA KERJA Data Permintaan TKI/TKW Dari Luar Negeri Data Persediaan TKI/TKW Dari Daerah Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI Rekrutmen Calon TKI/TKW Seleksi Naker Ke Luar Negeri Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW Persyaratan Naker TKI/TKW Permohonan Rekomendasi PasspoRumah Tangga Perjanjian Kerja TKI/TKW KaRumah Tanggau Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri Pelatihan TKI/TKW	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Hubungan Kerja Dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	560	Pemberangkatan Naker Pemberangkatan Ke Luar Negeri Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW Ke Luar Negeri Berita Acara Serah Terima TKI/TKW	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Hubungan Kerja Dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	560	Pemulangan Naker Kepulangan TKI/TKW Karena Kontraknya Habis Pemulangan TKI/TKW Ilegal TKI/TKW Terkena Kasus Pidana Terdidik (TKMT) Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP) Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional Pengembangan Kesempatan Berusaha/Peluasan Kerja Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Lembaga Penyalur Naker Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal/Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN) Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK) Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	560	Tenaga Kerja Orang Asing Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing Data Tenaga Kerja Asing Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing Pemulangan Tenaga Kerja Asing Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja Asing Ilegal	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Sekretariat,Bidang Pengawasan & Pengendalian pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2.Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat
	570	PENANAMAN MODAL Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Asing Modal Patungan (joint venture/penyertaan modal) Pasar Uang dan Modal Saham	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat,Bidang pada di Dinas PMD Dan PTSP Prov. Jateng
	580	PERBANKAN MONETER Kredit Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas Polis Premi Tertanggung/Pemegang Polis Uang Pertanggungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan pada Bagian Kredit Bank Jateng
	580	Investasi Tabungan Deposito Tabanas Taska Tapelpram Bank Pembangunan Daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan pada Bagian Pelayanan Bank Jateng

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bank Jateng Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer				
	590	AGRARIA Tata Guna Tanah Pengurusan Hak-hak Tanah Guna Usaha Hak Guna Bangunan				Kewenangan Pusat
	590	Pemetaan dan Pengukuran Perpetaan Penyediaan Data, Peta dan Publikasi Fakta Tata Guna Tanah Tanah Kritis Landreform Redistribusi Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian Penentuan Tanah Obyek Landreform Pembagian Tanah Landreform Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform Ganti Rugi Ganti Rugi Tanah Kelebihan Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan Ganti Rugi Tanah Absentee				
	590	Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee Ganti Rugi Tanah Partikelir Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir Bagi hasil Penetapan Imbangan Gadai Tanah				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	590	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Gadai Tanah Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah Pelaksanaan Gadai Tanah Sengketa Gadai Tanah Bimbingan dan Penyuluhan Pengembangan Yayasan Dana landreform (YDL) Pengurusan Hak-hak Tanah Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis Sewa Tanah Sewa Tanah untuk Tanaman tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus Hak Milik Perorangan Badan Hukum Hak Pakai Perorangan Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Badan Hukum Badan Hukum Indonesia Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing Tanah Gedung-Gedung Negeri Guna Usaha Perkebunan Besar Perkebunan Rakyat Peternakan Perikanan Kehutanan Hak Guna Bangunan				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	590	Perorangan Badan Hukum P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda) Badan Hukum Asing Belanda–PBK No.5/56 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/1960) Hak Pengelolaan				Kewenangan Pusat
	590	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate Perusahaan daerah Pembangunan Perumahan Sengketa Tanah Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183) Pencabutan dan Pembebasan Tanah Pencabutan Hak Pembebasan Tanah Ganti Rugi Tanah Pendaftaran Tanah Pengukuran/Pemetaan				Kewenangan Pusat
	590	Fotogrametri Terristris Triangulasi Peralatan Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 6/1960) Sertifikat Penjabat Pembuatan Akte Tanah Transmigrasi Tata Guna Tanah Landreform Pengurusan Hak-hak Tanah Pendaftaran Tanah				Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN Perumusan Kebijakan Bidang KePUan, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan Evaluasi Laporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang pada DPU Bina Marga Dan Cipta Karya, DPU Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 2. Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastuktur Dan SDA
	600	Arsitektur Bahan bangunan Tanah dan batu Aspal Besi dan logam lainnya Besi beton Besi Profil (konstruksi) Paku	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada DPU Bina Marga Dan Cipta Karya 2. Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	600	Alumunium profil Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu) S e m e n Terhadap serangga Terhadap radiasi atom	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada DPU Bina Marga Dan Cipta Karya
	600	K a y u Bahan penutup Atap Alat-alat penggantung dan pengunci	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bahan-bahan bangunan lainnya Instalansi Instalansi bangunan Instalansi listrik Instalansi air/sanitasi Instalansi pengatur udara Instalansi akustik Instalansi cahaya/penerangan Konstruksi pencegahan Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran Terhadap gempa Terhadap angin/udara/panas Terhadap kegaduhan, Terhadap gas/explosive		pengawasan serta penegak hukum		DPU Bina Marga Dan Cipta Karya
	610	PENGAIRAN Irigasi Bendungan Waduk Bendungan Tanggul Menara pengambilan Pembangunan dermaga Bangunan pengambilan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Irigasi dan Air Baku pada Dinas PU SDA Dan Penataan Ruang 2. Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur Dan SDA
		Bendungan Bendungan dengan pintu bilas Bendungan dengan pompa Pelimpahan banjir Inventarisasi data pantai Laporan Kejadian Banjir Pengambilan bebas Pengambilan bebas dengan pompa Sumur dengan pompa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Sungai Bendungan Dan Pantai pada Dinas PU SDA Dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	610	Kantung lumpur Silf ekstretor Escope chenel Bangunan pembawa Saluran Saluran induk Saluran sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Irigasi dan Air Baku pada Bidang Dinas PU SDA Dan Penataan Ruang
	610	Suplesi Tersier Saluran kwarter Saluran pasangan Saluran tertutup / terowongan Bangunan Bangunan bagi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Irigasi dan Air Baku pada Dinas PU SDA Dan Penataan Ruang
	610	Bangunan dan sadap Bangunan sadap Bangunan check Bangunan terjun Bax Tersier Got miring Talang Syphon Gorong-gorong Pelimpahan samping Bangunan Pembuangan Saluran Saluran Pembuangan induk Saluran Pembuangan sekunder Saluran Pembuangan tersier Bangunan Bangunan out let	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Irigasi dan Air Baku pada Dinas PU SDA Dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bangunan terjun Bangunan penahan banjir Gorong-gorong pembuangan Talang pembuang Syphon pembuangan Bangunan lainnya Jalan Jalan Inspeksi				
	610	Jalan Logistik Jembatan Jembatan inspeksi Jempatan Hewan Tangga cuci Kubangan kerbau Waduk lapangan Bangunan penunjang Jaringan telepon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Irigasi dan Air Baku pada Dinas PU SDA Dan Penataan Ruang
	610	Stasiun Argo Bangunan TPI dan pasar ikan P o l d e r Tanggul keliling Tanggul Bangunan penutup sungai Jembatan Bangunan pembawa Saluran muka Saluran pembawa induk Saluran pembawa sekunder Saluran stasiun pompa pemasukan Bangunan bagi : Gorong-gorong Syphon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Irigasi dan Air Baku pada Dinas PU SDA Dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bangunan pembuangan Stasiun pompa pembuangan Pintu Air Pembuangan Gorong-gorong pembuangan Syphon pembuangan Bangunan Pengukur Air Bangunan Pengukur Curah Hujan Bangunan Gudang Stasiun Pompa Bangunan Listrik Stasiun Pompa Rumah Petugas Eksploitasi Pasang surut Saluran Pembawa Tersier Saluran Penyimpanan Air Saluran Pintu Pembuangan Bangunan pembuangan Saluran Pintu Pembuangan Bangunan lainnya				
	610	Kolom pasang Saluran Saluran Lalu Lintas Saluran Muka Bangunan Bangunan Penangkis Kotoran Bangunan Pengukur Muka air Pengendalian sungai Bangunan pengaman Tanggul banjir Pintu Pengatur Banjir Klep Pengatur Banjir Tembok pengaman Talut K r i b Kantung Lumpur	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai pada Dinas PU SDA Dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Check Dam Syphon Saluran pengaman Saluran banjir Saluran Drainage Corepure Bangunan lainnya Warning System Stasiun, Stasiun Pompa Stasiun pengukur Curah Hujan Stasiun Pengukur Air Stasiun Pengukur Cuaca Stasiun Pos Penjagaan Pengaman Pantai Tanggul K r i b Bangunan lainnya Air Permukaan (Danau,Waduk, Sungai)				
	620	J A L A N Jalan Provinsi Daerah Penguasaan T a n a h	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah pada Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya
	620	Bangunan Bangunan sementara Jalan Sementara Kantor proyek Gedung proyek Barak Kerja	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah, Bidang Sarana Prasarana dan Permukiman Bangunan Gedung

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Laboratorium Lapangan R u m a h				pada Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya 2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	620	Badan Jalan Pekerjaan Tanah (earth work) Stabilisasi Perkerasan Lapisan Pondasi bawah Lapisan Pondasi Lapisan Permukaan Drainage Parit Tanah Gorong-gorong (culvert) Buku Trotoir Tanah Perkerasan Pasangan M e d i a n T a n a h Tanaman Perkerasan Pasangan Daerah sampingan Tanaman	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah, Bidang Sarana Prasarana dan Permukiman Bangunan Gedung pada Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya, 2. Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur Dan SDA 3. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pagar Bangunan Pelengkap dan Pengaman Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas Lampu Penerangan Lampu Pengaturan lalu Lintas Patok-patok KM Patok-patok R.O.W. (Sempadan) Rel Pengamanan P a g a r Turap Penahan Bronjong				Daerah
	620	Jalan Provinsi Daerah penguasaan Tanah Bangunan Jalan sementara Jembatan sementara Kantor/Gedung Proyek	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah, Bidang Sarana Prasarana dan Permukiman Bangunan Gedung pada Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya 2. Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur dan SDA 3. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Daerah
	620	Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Badan jalan Pekerjaan tanah (earth work) Stabilisasi Perkerasan (pavement) Lapis pondasi bawah Lapis pondasi Lapis permukaan Drainage Parit Gorong-gorong (culvert) Buku trotoir Tanah Perkerasan Trotoir Tanah Perkerasan Median Tanah Tanaman Perkerasan Pasangan Daerah samping Tanaman Pagar Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan Rambu-rambu Lampu penerangan Lampu Pengatur lalu lintas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah, Bidang Sarana Prasarana dan Permukiman Bangunan Gedung pada Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya 2. Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur dan SDA 3. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Patok-patok KM				
	620	Patok-patok R,O,W (sempadan) Rel pengamanan Pagar Turap penahan Bronjong Daerah penguasaan Badan jalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya
	620	Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan) Drainase (gorong-gorong, parit) Median Daerah samping (pagar, tanaman) Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah pada Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya
	630	JEMBATAN Jembatan pada jalan Provinsi Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor Proyek Gedung Proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah (earth work) Galian tanah Timbunan tanah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah pada Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pondasi Pondasi kepala jembatan Pondasi pilar Pondasi angker Bangunan bawah Kepala jembatan Pilar Piloon				
	630	Landasan Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/trotoar Sandaran Talang air	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah pada Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya
	630	Bangunan pengaman Turap/penahan Bronjong Strek Dam Kist Dam Coupute Krip Bangunan pelengkap Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas Patok pengamanan Patok R.O.W. (sempadan) Oprit Badan Perkerasan Drainage	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah pada Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Baku Median Jembatan pada jalan Provinsi Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor Proyek Gedung Proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah (earth work) Galian tanah				
	630	Timbunan tanah Pondasi Pondasi kepala jembatan Pondasi pilar Pondasi angker Landasan Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/trotoir Sandaran Talang air Bangunan pengaman Turap/penahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah pada Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bronjong Strek Dam Kist Dam Coupute Krip Bangunan pelengkap Rambu-rambu/tanda-tanda lau lintas Patok pengamanan Patok R.O.W. (sempadan) Oprit Badan Perkerasan Drainage Baku Median Jembatan pada jalan Nasional Daerah Penguasaan (tanah, tanaman bangunan) Bangunan sementara (gudang proyek, kantor proyek) Pondasi Bangunan bawah Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan) Bangunan pengamanan (bronjong strek dam, krib) Bangunan pelengkap dan pengaman				
	640	BANGUNAN Bangunan Pemerintah: Gedung Pengadilan, Rumah Pejabat Negara, Gedung DPR, Gedung Balai Kota, Penjara, Perkantoran Bangunan Pendidikan: Taman Kanak-kanak, SD & Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi Bangunan Rekreasi Bangunan Olah Raga Gedung Kesenian, Gedung Pemancar	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung pada Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bangunan Perdagangan: Pusat Perbelanjaan, Gedung Perdagangan Perkantoran Bangunan Pelayanan Umum: Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum Gedung parkir Rumah sakit Gedung telkom Terminal Angkutan Umum/Angkutan Air/Angkutan Darat Bangunan Keagamaan, Bangunan Peninggalan Sejarah Monumen Candi Kraton Rumah Tradisional Bangunan Industri Bangunan Tempat Tinggal Rumah Perkantoran				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	640	Rumah Pedesaan Rumah contoh Real estate Elemen Bangunan Pondasi Diatas tiang Dinding Penahan beban Tidak menahan beban A t a p Lantai/langit-langit Suspendend Solit Pintu/jendela, Pintu hermonik, Pintu biasa, Pintu sorong Jendela kayu, Jendela sorong, Jendela vertikal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman 2.Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	640	FASILITAS PENGADAAN TANAH Perumusan Perencanaan Teknis Pengoordinasian Fasilitas Pengadaan Tanah Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Tanah, Penetapan Lokasi, Ganti Rugi dan Santunan Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Aset Daerah sampai dengan sertifikatnya Penetapan Obyek/Subyek Redistribusi Tanah, Serta ganti kerugian Tanah dan Absente lintas Daerah Kab/Kota. Fasilitasi administrasi Pertanahan Penetapan tanah ulayat lokasinya lintas daerah Evaluasi dan Pelaporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 2.Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur Dan SDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	640	<p>FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis</p> <p>Penyiapan Bahan Pengoordinasian</p> <p>Menyiapkan Perumusan Kebijakan Teknis</p> <p>Fasilitasi Penyediaan Rumah</p> <p>Inventarisasi Permasalahan Pertanahan Kab/Kota</p> <p>Fasilitasi Penyelesaian Sengketa tanah garapan lintas daerah Kab/Kota</p> <p>Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santuanan tanah untuk pembangunan.</p> <p>Inventarisasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kab/kota.</p> <p>Penyelesaian masalah tanah lintas daerah.</p> <p>Evaluasi dan Pelaporan.</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman</p> <p>2. Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur Dan SDA</p>
	640	<p>PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis.</p> <p>Menyiapkan bahan pengoordinasian.</p> <p>Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat.</p> <p>Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kab/kota.</p> <p>Pemberian ijin lokasi.</p> <p>Evaluasi dan Pelaporan.</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman</p> <p>2. Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur Dan SDA</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	640	PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN Perencanaan Teknis Pembiayaan Perumahan Perencanaan Perumahan Pembangunan Perumahan Pelayanan data Teknis / Konstruksi Perumahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	640	PERUMAHAN UMUM Perumusan Kebijakan Teknis Penyediaan Prasarana sarana Utilitas Umum Rumah Korban Bencana Daerah Fasilitasi Penyediaan Rumah Penyediaan Rumah Susun Khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Rumah Tapak Sederhana sehat bagi Masyarakat Berpernghasilan Rendah. Pelaporan di bidang Perumahan Umum.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 2. Bagian Infrastruktur pada Infrastruktur Dan SDA
	640	PERUMAHAN SWADAYA Kebijakan Teknis di Bidang Perumahan Swadaya. Pengoordinasian di Bidang Perumahan Swadaya. Pengembangan Perumahan Swadaya. Fasilitasi dan Stimulan. Pembangunan, Pemanfaatan Rumah bagi Rumah Tangga Miskin.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 2. Bagian Infrastruktur pada Infrastruktur Dan SDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	640	PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Penyiapan Bahan Pengoordinasian. Perencanaan Petunjuk Teknis. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Prasarana dan Sarana Utylitas Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pemukiman pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 2. Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	640	PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Menyiapkan Bahan Pengoordinasian. Pengkajian Prasarana Sarana Utylitas. Penyusunan dan Pengembangan. Pengembangan Jejaring Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pemukiman dan Bidang Keterpaduan Perumahan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 2. Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	640	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Pengoordinasian. Bimbingan Teknis dan Supervisi. Pengkajian dan Penyusunan Inovasi. Fasilitasi Peningkatan. Pengembangan Jejaring Kemitraan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pemukiman dan Bidang Keterpaduan Perumahan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Evaluasi dan Pelaporan.				Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 2. Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur Dan SDA
	640	PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN. Perumusan Kebijakan teknis. Penyiapkan Bahan Pengoordinasian. Penyusunan Data Base. Pengelolaan Data. Pengelolaan Sistem Informasi dan Publikasi Pemanfaatan Rumah bagi Korban Bencana Alam. Pemeliharaan Prasarana Sarana Uilityas Perumahan Swadaya. Pemberdayaan dan Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Keterpaduan Perumahan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 2. Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur Dan SDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	650	TATA RUANG KOTA Daerah perdagangan/pelabuhan Daerah Pusat Perbelanjaan Daerah Perkantoran Daerah Pemerintahan Daerah Perumahan (site & servei) Kepadatan Rendah (low density) Kepadatan Tinggi (high density) Daerah Industri Industri Berat Industri Ringan Industri Rumah (home industri) Daerah Rekreasi (open spece) Publik Garden Sport& playing fields Open space Transportasi (tata letak) Jaringan jalan Penerangan jalan Jaringan kereta api	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penataan Ruang pada Dinas PU SDA Dan Penataan Ruang 2. Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur Dan SDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	650	Jaringan sungai Assineering Saluran Pengumpulan Instansi Pengolahan Bangunan Bangunan Penyaring Bangunan Penghancur Kotoran Bangunan Pengendapan Bangunan Pengering Lumpur Unit Disinfektan Unit Perpompaaan Kesehatan Lingkungan Persampahan Bangunan pengumpulan Bangunan pemusnahan Pengotoran Udara Pengotoran Air Air Buangan Industri Kegaduhan Kebersihan kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Irigasi Dan Air Beku pada Dinas PU SDA Dan Penataan Ruang
	660	TATA LINGKUNGAN Lingkungan Hidup Kebersihan Lingkungan Pencemaran Pencemaran Air Pencemaran Udara Pencemaran Tanah Pencemaran Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Kerusakan lingkungan Konservasi Pesisir Dan Laut	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2. Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Konservasi Sumber Daya Alam				Dan ESDM pada Biro Infrastruktur Dan SDA
		Pentaatan Hukum Lingkungan Laboratorium Lingkungan Air, Udara, Tanah Analisis Dampak Lingkungan Pengembangan Teknologi Lingkungan Pengembangan Kapasitas Pengamanan Lingkungan				Bidang Penegakan hukum dan Perlindungan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
	680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada : 1. Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya, 2. Dinas PU SDA dan Tata Ruang 3. Dinas PU Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	700	PENGAWASAN Kebijakan dan program pengawasan Pengawasan perencanaan pengadaan/proyek Pengawasan Inventarisasi Asset Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen Pengawasan Penelitian/Riset Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Irbangwil dan Irbangsus pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Teknologi Pengawasan Pertanahan/BPN				
	710	BIDANG PEMERINTAHAN Pengawasan Pemerintahan Provinsi Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Pemerintahan Desa	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Irbangwil dan Irbangsus pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	720	BIDANG POLITIK Pengawasan Partai termasuk pendanaan partai, atribut partai dll Pengawasan pembinaan ipoleksosbud hankam Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/tani dan kepemudaan Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME.	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Irbangwil dan Irbangsus pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN Pengawasan Kesbangpolinmas Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/SAR	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Irbangwil dan Irbangsus pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Pengawasan Pembangunan Desa Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Pengawasan Kebudayaan Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat Pengawasan SARA (Suku Agama Ras) Pengawasan Kesejahteraan Sosial Pengawasan Kependudukan Migrasi/Urbanisasi Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Irbangwil dan Irbangsus pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	750	BIDANG PEREKONOMIAN Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian Pengawasan Pertanian dan Perkebunan Pengawasan Kehutanan Pengawasan Pertambangan/ESDM Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian Pengawasan PMDN/PMA Pengawasan Perbankan/Moneter Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Irbangwil dan Irbangsus pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM Pengawasan Pengairan Pengawasan Jalan Pengawasan Jembatan Pengawasan Bangunan Pengawasan Tata Ruang Kota Pengawasan Tata Lingkungan Pengawasan Ketenagaan Pengawasan Air Minum	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Irbangwil dan Irbangsus pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK Penyimpangan Pejabat Publik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Irbangwil dan Irbangsus pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	780	BIDANG KEPEGAWAIAN Pengawasan Pengadaan PNS Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS Keanggotaan PNS dalam Parpol Penyimpangan pejabat/PNS Persengketaan PNS	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Irbangwil dan Irbangsus pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
	790	BIDANG KEUANGAN Pengawasan Anggaran Pengawasan Akuntansi Pengawasan Perbendaharaan Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah Pengawasan Pendapatan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Irbangwil dan Irbangsus pada Inspektorat 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

Pt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

